

---

# RESPONSIVITAS DPPKBP3A KABUPATEN SUMEDANG MELALUI KEGIATAN REMBUK STUNTING DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN SUMEDANG

Dea Siti Nureza  
Universitas Sebelas April

---

## Article Info

### Article history:

Received Jul 12, 2025

Revised Nov 15, 2025

Accepted Nov 30, 2025

### Keywords:

Responsiveness

Stunting Discussion

Reduction of Stunting

---

## ABSTRACT

*This study aims to determine the responsiveness of the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Agency of Sumedang Regency in efforts to reduce stunting rates through stunting discussion activities. The method used in this study is qualitative. This study also highlights the importance of inter-agency coordination and effective monitoring to ensure the success of the stunting reduction program in Sumedang District. The results of the study show that despite significant efforts by the local government, there are still challenges in program implementation that need to be addressed to achieve the expected stunting reduction targets. The recommendations provided by the authors include enhancing the skills of DPPKBP3A staff in Sumedang District, particularly in family accompaniment and child growth monitoring, increasing the availability of adequate and qualified human resources, and improving collaboration among other sectors to ensure more targeted program implementation.*



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

---

## Corresponding Author:

Dea Siti Nureza  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sebelas April Sumedang  
Jl. Angkrek Situ No.19 Kelurahan Situ-Sumedang  
Email: [deasitinureza@gmail.com](mailto:deasitinureza@gmail.com)

---

## 1. INTRODUCTION

Stunting merupakan kondisi dimana pertumbuhan anak tidak sesuai dengan usianya, yang terjadi pada periode awal pertumbuhan atau dikenal sebagai 1000 hari pertama kehidupan yakni 280 hari selama kehamilan dan 720 hari pertama setelah bayi melahirkan. Stunting menjadi perhatian khusus, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia. Menurut *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2017 prevalensi stunting sekitar 22%, Data Riset Kesehatan Dasar Menteri Kesehatan RI (RISKESDAS) menunjukkan di Indonesia pada tahun 2018 sekitar 30,7%, sedangkan pada provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sekitar 23,6%, sedangkan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 sekitar 14,4%. Meskipun demikian, angka stunting di Kabupaten Sumedang sudah menurun dari 8,17% menjadi 7,96% akan tetapi masih terdapat jumlah risiko stunting pada beberapa daerah di Kabupaten Sumedang masih cukup tinggi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting disahkan untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Perpres ini mengatur beberapa aspek penting, diantaranya strategi nasional, tata kelola penyelenggaraan, koordinasi antar instansi, pemantauan, evaluasi, dan pendanaan yang diperlukan dalam upaya penurunan angka stunting. Strategi nasional yang dimaksud yaitu melibatkan pendekatan yang menyeluruh dari intervensi kesehatan, perbaikan gizi, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, sampai dengan pemberdayaan masyarakat. Selain dari itu, penyelenggaraan program penurunan stunting diatur dalam Delapan aksi konvergensi stunting diantaranya kegiatan rembuk stunting. Menurut Fitrauni et.al (2022:198) mengemukakan bahwa “Rembuk Stunting merupakan wadah para pimpinan dan pemangku kepentingan pemerintah kabupaten/kota untuk menggalang dan mendeklarasikan komitmen terhadap isu stunting untuk menjadi prioritas bersama lintas sektor, kecamatan, desa, dan berbagai pemangku kepentingan di wilayah pemerintah kabupaten/kota”. Kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk mencegah stunting, yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien. Responsivitas birokrasi diperlukan untuk bekerja sama dalam melangsungkan percepatan penurunan angka stunting.

Menurut Dwiyanto (2021:61) berpendapat bahwa Responsivitas adalah kemampuan birokrasi pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa responsivitas merujuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun Menurut Hayat (2019:34) menjelaskan bahwa “Responsivitas adalah peka terhadap kebutuhan dan kondisi yang ada sebagai bentuk pemberian pelayanan yang baik dan berkualitas”. Sedangkan menurut Brown dalam Hardiansyah (2022:56) “*Responsiveness* atau responsivitas yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat”. Sedangkan birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur”. (Candra, 2024:38).

Menurut Ramadani (2021:86) menjelaskan Responsivitas birokrasi adalah konsep yang menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, serta birokrasi harus merespons secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Rivai et.al (2023:82) menjelaskan bahwa Responsivitas birokrasi memainkan peran penting menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, dengan menjadi responsif terhadap permintaan, keluhan, dan harapan masyarakat, birokrasi dapat membangun kepercayaan, meningkatkan partisipasi warga negara, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa responsivitas birokrasi merupakan aspek penting yang menunjukkan seberapa cepat, tepat dan efektif lembaga pemerintah dalam merespons dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Responsivitas birokrasi merupakan kemampuan suatu organisasi, lembaga atau individu dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat serta relevan terhadap segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya baik di pemerintahan maupun organisasi lainnya. Pemerintahan Kabupaten Sumedang dalam merumuskan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan rembuk stunting yang melibatkan stakeholder. Dalam hal ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang memiliki keterlibatan dan kontribusi dalam merumuskan langkah yang efektif dalam mencegah dan mengatasi stunting melalui kegiatan rembuk stunting. Dengan demikian, situasi ini menjadi dorongan kuat bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengoptimalkan kembali upaya dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan dalam merespon kegiatan rembuk stunting diantaranya, kurangnya kemampuan pegawai dalam menggunakan aplikasi digital untuk menginput dan penyampaian data stunting sehingga memperlambat respon terhadap kasus dilapangan, kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan stunting di DPPKBP3A Kabupaten Sumedang masih perlu ditingkatkan, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rembuk stunting.

Berdasarkan latar belakang peneliti yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menguraikan ke dalam fokus penelitian sebagai berikut:

1. Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang melalui kegiatan Rembuk Stunting dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Sumedang.
2. Faktor penghambat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang melalui kegiatan Rembuk Stunting dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Sumedang.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang melalui kegiatan Rembuk Stunting dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Sumedang.

Menurut Rivai, et.al. (2023:82) Responsivitas birokrasi dapat diukur berdasarkan 3 dimensi berikut :

1. Kecepatan, mencerminkan kemampuan birokrasi untuk memberikan layanan dan respon yang cepat terhadap permintaan dan kebutuhan masyarakat.
2. Aksesibilitas, menggambarkan sejauh mana birokrasi dapat dijangkau oleh masyarakat, aksesibilitas juga berhubungan dengan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, umpan balik, atau keluhan terkait pelayanan birokrasi.
3. Transparansi, mencerminkan keterbukaan dan akuntabilitas birokrasi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Keterbukaan, mencakup ketersediaan birokrasi untuk menerima masukan, kritik, atau saran dari masyarakat.

Dimensi-dimensi tersebut juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi hambatan serta strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam merespons kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumedang. Dalam pelaksanaan penelitian responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam penurunan angka stunting melalui kegiatan rembuk stunting di Kabupaten Sumedang, penelitian ini mengkaji sejauhmana DPPKBP3A Kabupaten Sumedang berkontribusi dan merespons program Pemerintah Daerah dalam kegiatan rembuk stunting.

## 2. METHOD

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang dikenal sebagai metode naturalistik, karena dilakukan dalam lingkungan yang alami dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2022:9) mengatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Teknik penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk menentukan informan, Teknik pengumpulan data yang digunakan, studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini yaitu, *data collection, data reduction, data display, Conclusion Drawing/Verification* dan *triangulasi*. Dan teknik keabsahan data dengan Uji Kredibilitas, Uji Transferabilitas, Uji Depenabilitas, Uji Konfirmabilitas.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

Responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik tidak hanya mencakup kemampuan untuk menanggapi secara administratif, tetapi juga menunjukkan bahwa seseorang benar-benar peduli dengan masalah yang berkembang di masyarakat. Penanganan stunting merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas nasional, yang membutuhkan kerja sama dari berbagai sektor termasuk lembaga teknis dan lokal diantaranya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

Dalam pembahasan ini terdapat empat kriteria dalam mengukur responsivitas birokrasi yang dikemukakan oleh Rivai, eat.al (2023: 83-84) yaitu:

1. Kecepatan
2. Aksesibilitas
3. Transparansi

#### 4. Keterbukaan.

Kriteria pengukuran responsivitas menjadi dasar dalam mengidentifikasi hambatan serta strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara kepada empat informan, maka didapatkan gambaran mengenai Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang melalui kegiatan Rembuk Stunting dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang.

### **Hasil Penelitian Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Melalui Kegiatan Rembuk Stunting Dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting di Kabupaten Sumedang.**

#### **a) Kecepatan**

Dimensi ini menjelaskan bagaimana kecepatan DPPKBP3A Kabupaten Sumedang dalam menangani permasalahan stunting dengan melakukan koordinasi lintas sektor dan menyusun langkah-langkah intervensi khususnya dalam kegiatan rembuk stunting.

##### 1) Tindakan dalam merespons

Tindakan dalam merespon upaya percepatan penurunan angka stunting dilakukan dengan kegiatan rembuk stunting yang mana DPPKBP3A Kabupaten Sumedang merupakan salah satu fasilitator dalam upaya percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai kontribusi khususnya dalam advokasi dan menjembatani program-program kepada masyarakat.

##### 2) Ketanggapan dalam merespons

Ketanggapan dalam menyesuaikan program terlihat dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilakukan oleh DPPKBP3A Kabupaten Sumedang melalui bidang advokasi dan informasi yang berkoordinasi dengan Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting.

##### 3) Efisiensi sumber daya manusia

Efisiensi sumber daya manusia dalam percepatan penurunan stunting dilakukan dengan pendampingan petugas lapangan, optimalisasi tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, pembinaan dan pendampingan.

#### **b) Aksesibilitas**

Aksesibilitas terhadap responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam kegiatan rembuk stunting tercermin dari kemudahan masyarakat dan memperoleh informasi, layanan, dan berpartisipasi dalam upaya penurunan angka stunting. Melalui kegiatan rembuk stunting membuka akses kepada masyarakat melalui informasi dan komunikasi.

##### 1) Waktu kegiatan

Waktu pelaksanaan rembuk stunting dilaksanakan secara terjadwal yaitu setiap dua kali dalam setahun. Dengan demikian, waktu kegiatan rembuk stunting, maka dapat dikatakan terjadwal dengan baik.

##### 2) Jangkauan Kegiatan

Jangkauan kegiatan dalam kegiatan rembuk stunting memiliki jangkauan luas yang mencakup seluruh wilayah kecamatan, desa di seluruh Kabupaten Sumedang dengan melibatkan kader posyandu, bidan desa, tokoh masyarakat serta berkoordinasi dengan PKK, pemerintah desa dan masyarakat.

##### 3) Teknologi dan informasi

Teknologi digital efektif dalam mendukung penyebaran informasi dan transparansi data, terutama melalui media digital seperti aplikasi SIMPATI, Elsimil yang digunakan untuk pelaporan kegiatan, serta instagram yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi dalam kegiatan percepatan penurunan stunting.

#### **c) Transparansi**

Transparansi dalam responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam kegiatan rembuk stunting merujuk pada keterbukaan informasi, proses dan pengambilan keputusan yang dapat di akses masyarakat.

##### 1) Kepatuhan birokrasi

Kepatuhan birokrasi terhadap regulasi di DPPKBP3A Kabupaten Sumedang dilaksanakan sesuai Standar Operasional (SOP) yang berlandaskan Perpes No.72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 82 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi dan monitoring sering dilakukan pada aplikasi digital.

2) Ketersediaan informasi

Ketersediaan informasi kegiatan percepatan penurunan stunting DPPKBP3A Kabupaten Sumedang dipublikasikan secara jelas dan terbuka melalui media digital untuk mendukung transparansi dan kemudahan informasi.

d) **Keterbukaan**

Keterbukaan dalam dalam responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang merupakan wujud nyata dari keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program penurunan stunting, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Dalam hal ini, keterbukaan tidak hanya dimaknai sebagai akses terhadap informasi, tetapi juga mencerminkan ruang di mana masyarakat dapat terlibat aktif, berkontribusi, dan berperan dalam pelaksanaan program.

1) Partisipasi masyarakat

DPPKBP3A Kabupaten Sumedang dalam menjalankan program pada kegiatan rembuk stunting melibatkan partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok seperti Bina Keluarga Balita dan Anak (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), yang memberikan edukasi sesuai dengan tahap perkembangan keluarga.

2) Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan rembuk stunting baik pemerintah daerah, perangkat desa, masyarakat maupun sektor lainnya harus mampu mempertanggungjawabkan peran serta komitmen yang telah disepakati dalam kegiatan rembuk stunting. Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam kegiatan rembuk stunting dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan melibatkan berbagai stakeholder lainnya.

**Hasil Penelitian Faktor Penghambat Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Melalui Kegiatan Rembuk Stunting Dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting di Kabupaten Sumedang.**

Berdasarkan hasil identifikasi faktor penghambat berdasarkan dimensi-dimensi responsivitas birokrasi menurut Rivai, et.al (2023:83-84) yaitu Kecepatan, Aksesibilitas, Transparansi, dan Keterbukaan, menunjukkan bahwa dalam responsivitas DPPKBP3A Kabupaten Sumedang terhadap kegiatan rembuk stunting secara keseluruhan menunjukkan masih adanya berbagai hambatan. Tindakan dalam merespon kegiatan masih mengalami berbagai hambatan diantaranya koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya respon masyarakat.

Aksesibilitas dalam kegiatan rembuk stunting secara umum tidak menunjukkan hambatan yang signifikan, tetapi pada jangkauan kegiatan terdapat beberapa hambatan kurangnya responsivitas masyarakat dalam kegiatan tersebut, serta keterbatasan akses internet di beberapa wilayah yang menyebabkan informasi lambat tersampaikan.

Transparansi dalam pelaksanaan rembuk stunting di DPPKBP3A Kabupaten Sumedang terdapat kepatuhan regulasi dan semua ASN patuh terhadap peraturan yang ada. Namun masih ada sebagian pegawai yang memerlukan penguatan pemahaman dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Keterbukaan dalam kegiatan rembuk stunting menunjukkan tantangan yang cukup nyata, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan penurunan angka stunting sehingga keterlibatan aktif masyarakat menjadi terbatas. Dengan demikian, perlu adanya strategi dalam menangani hambatan tersebut.

**Hasil Penelitian Upaya Menangani Faktor Penghambat Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Melalui Kegiatan Rembuk Stunting Dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting di Kabupaten Sumedang.**

Upaya sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan birokrasi. Rembuk stunting merupakan forum musyawarah untuk menyelesaikan kegiatan lintas sektor dalam penurunan stunting. Dalam hal ini DPPKBP3A Kabupaten Sumedang telah berkontribusi dalam membantu upaya dalam mengatasi hambatan kegiatan tersebut.

Kecepatan dalam merespon kegiatan rembuk stunting, DPPKBP3A Kabupaten Sumedang menunjukkan hasil yang baik dengan melakukan berbagai upaya strategis. Dengan melakukan evaluasi bulanan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kapasitas pegawai agar kinerja menjadi lebih efektif.

Dalam meningkatkan aksesibilitas pada kegiatan rembuk stunting, DPPKBP3A Kabupaten Sumedang berupaya dalam menekankan pentingnya menjaga partisipasi aktif masyarakat melalui komunikasi yang efektif dan komitmen terhadap kegiatan. Berbagai pendekatan telah diterapkan khususnya membuat perencanaan kegiatan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Strategi pemanfaatan aplikasi digital dan didukung dengan pendampingan serta pelatihan bagi petugas guna memastikan kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Dalam aspek transparansi DPPKBP3A Kabupaten Sumedang telah melakukan upaya dalam mengatasi hambatanya dengan menjaga kepatuhan birokrasi melalui sosialisasi berkala agar pelaksanaan program tetap sesuai regulasi. Selain itu, penyampaian informasi dilakukan secara luas dan terbuka melalui media digital dan manual agar terjangkau secara menyeluruh.

Dalam aspek keterbukaan, DPPKBP3A Kabupaten Sumedang mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat melalui berbagai strategi yakni dengan edukasi, penyesuaian waktu kegiatan, koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pelibatan pengambilan keputusan dalam kegiatan rembuk stunting. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang.

#### 4. CONCLUSION

Kegiatan Rembuk Stunting merupakan kegiatan forum diskusi di tingkat desa, kecamatan, atau Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk menyepakati program penurunan angka stunting secara terintegrasi. Kegiatan Rembuk Stunting di Kabupaten Sumedang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sumedang. Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sumedang melalui kegiatan Rembuk Stunting dalam upaya penurunan angka stunting secara keseluruhan tanggapannya dapat dikatakan baik dan relatif optimal, terutama dalam aspek kecepatan, aksesibilitas, transparansi, dan keterbukaan. Namun, terdapat sejumlah hambatan seperti koordinasi lintas sektor yang belum maksimal, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat karena kurangnya pemahaman yang perlu terus ditingkatkan untuk mencapai keberhasilan yang lebih optimal. Strategi yang dilakukan DPPKBP3A Kabupaten Sumedang melalui evaluasi bulanan, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pegawai, yang menunjukkan strategi terhadap responsivitas isu stunting. Hal tersebut, diharapkan dapat mendukung kegiatan rembuk stunting dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang lebih optimal.

#### REFERENCES

- Candra, M. (2024). *Birokrasi dan Good governance*. Jakarta: Kencana.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Sleman: Ugm Press.
- Fitrauni, R., Muchlis, N., & Arman, A. (2022). Strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sigi. *Journal of Muslim Community Health*, 3(4), 193–209.
- Hardiansyah. (2022). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hayat. (2019). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Meiyani, E., & Hardi, R. (2024). *Transformasi Digital Dan Pemerintahan Responsif*. Purbalingga: Penerbit Eureka.
- Ramadani, R. (2021). Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 249–265.
- Rivai Ilmiah Nur, & Tahris Pangabea. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik: Efisiensi dan Responsivitas Birokrasi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widyaningsih, C. A., Didah, D., Sari, P., Wijaya, M., & Rinawan, F. R. (2021). Identifikasi Faktor-Faktor Kejadian Stunting. *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)*, 7(2), 207-214.